

BAB IV

RESPON PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP PEMBERONTAK KESULTANAN SULU ATAS KLAIM WILAYAH SABAH

Pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana sikap dan tindakan Pemerintah Malaysia dalam merespon klaim wilayah Sabah yang dilakukan oleh Kesultanan Sulu. Untuk menganalisa kasus krisis ini penulis menggunakan model interaksi antar negara : konflik dan resolusi konflik, sesuai dalam buku yang ditulis oleh K.J. Holsti⁶⁰. Secara jelas dipaparkan dalam buku K.J Holsti tentang berbagai macam interaksi antar Negara, tentang bagaimana suatu Negara itu bertindak dan menjalin hubungan dengan beberapa Negara. Selain itu juga untuk menguji hubungan konflik di wilayah Sabah yang mengandung kemungkinan kekerasan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi interaksi antara Pemerintah Malaysia dengan Pihak Kesultanan Sulu.

Konflik yang menimbulkan kekerasan secara terorganisasi muncul dari suatu cara pandang yang saling berlawanan mengenai suatu isu atau permasalahan. Aktor dalam suatu konflik internasional biasanya (tetapi tidak mutlak) adalah pemerintah Negara bangsa. Yang menarik dalam kasus ini adalah konflik yang terjadi bukan antar negara bangsa, tetapi suku bangsa di wilayah Filipina bagian selatan (Kesultanan Sulu) dan negara bangsa (Pemerintah Malaysia). Sebenarnya

ada *inbalancing power* dalam sengketa ini, karena kita sudah bisa melihat peta kekuatan diantara dua pihak yang berkonflik di Sabah. Pada akhirnya konflik di Sabah dapat menghasilkan suatu tindakan, ancaman dan hukuman yang bersifat diplomatik, propaganda atau militer. Dengan demikian, sikap para pembuat kebijakan di Malaysia dapat mempengaruhi keputusan dalam membuat ancaman balik, melaksanakan hukuman dan tindakan yang diambil dalam menyikapi ancaman dari pihak luar.⁶¹ Terkait masalah sikap terhadap konflik di Sabah, bahwa ada sikap dan kecenderungan dari pemerintah Malaysia untuk menggunakan kekerasan dalam usaha untuk mencapai atau mempertahankan tujuan kolektif, seluruh masyarakat Malaysia. Dalam tulisan Holsti menyatakan, beberapa sikap yang diambil untuk memutuskan suatu langkah dalam situasi krisis .

Yang pertama *perasaan mendesak* yang menghantui para pembuat kebijakan setidak-tidaknya selama tahap krisis suatu konflik internasional. Pihak Pemerintah Malaysia dan Sultan Sulu Jamalul Kiram III tentu akan merasa bahwa hanya memiliki waktu yang singkat untuk mengambil keputusan dan tindakan yang sangat mendesak. Keputusan atau tindakan yang akan diambil secara cepat tersebut mungkin akan menghasilkan sejumlah konsekuensi yang berbahaya, dan tindakan represif sangat mungkin terjadi.⁶² Pemerintah Malaysia

⁶¹ *Ibid*, hlm 169-171

⁶² Kennedy, Robert. F; *Thirteen Days* (New York ; Norton, 1969) ; Charles F. Hermann, *crises in foreign policy making ; A Simulation of international politics* (China Lake, Calif ; Project Michelson report US Naval ordinance

melalui Perdana Menteri Najib Razak dan Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan tepat dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya, begitu pula dari pihak Kesultanan Sulu.

Yang kedua adalah tindakan atau sikap para pembuat kebijakan ketika dalam situasi krisis diantara para pihak (Negara). Untuk memecahkan masalah para pihak yang berselisih, perang dipandang sebagai sesuatu yang wajar untuk mengakhiri sengketa.⁶³ Pemerintah Malaysia secara tegas mengumumkan kepada masyarakat luas dan media massa, akan menindak tegas para pemberontak Kesultanan Sulu yang akan menduduki Sabah. Keputusan-keputusan yang bersifat konfrontatif dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan di Kuala Lumpur, pihak Malaysia mendeklarasikan untuk melancarkan serangan militer secara besar-besaran demi mengusir para pemberontak di Lahad Datu.

Dibawah ini penulis akan memaparkan tindakan-tindakan Pemerintah Malaysia sebagai respon atas invasi militer yang dilancarkan Pihak Kesultanan Sulu, untuk mengambil alih Negeri Sabah. Kebijakan tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa sudut pandang, yang pertama dilihat dari sudut pandang internal, yang berisi tentang beberapa pokok kebijakan domestik Malaysia, antara lain pembentukan Operasi Daulat, penerapan *East Sabah Security Command*

Dikutip dari buku Holsti, K.J. , terjemahan M. Tahir Azhary, *Politik Internasional ; Kerangka untuk analisa*, edisi keempat jilid 2. Airlangga, 1988

⁶³ *Op. cit.* Holsti , K.J, hlm 176-177

(ESSCOM) dan *Eastern Sabah Security Zone* (ESSZONE) . Yang kedua dilihat dari sudut pandang eksternal, membahas tentang kebijakan luar negeri Pemerintah Malaysia dan disertai bukti-bukti pendukung dari luar yang menyangkut kepemilikan wilayah Sabah. Kebijakan-kebijakan yang akan dibahas dibawah ini merupakan kesimpulan sementara dari penulis untuk melihat sengketa di wilayah Sabah.

A. Kebijakan Dalam Negeri Pemerintah Malaysia Sebagai Respon Terhadap Invasi Yang Dilakukan Kesultanan Sulu di Wilayah Sabah.

Pemerintah Malaysia tentu mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Sultan Sulu beserta pengikutnya. Pemerintah Malaysia tentu saja akan mempertahankan *Status Quo* demi kepentingan kolektif warga Malaysia dan keutuhan wilayah Malaysia. Dalam konstitusi Malaysia sudah dinyatakan bahwa Sabah secara resmi masuk dalam teritorial Malaysia sesuai dengan konstitusi Malaysia tahun 1963, yang menyatakan negeri serawak dan Sabah secara sah masuk dalam persekutuan Malaysia.⁶⁴ Dan mengenai batas teritorial secara geografis juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia dalam Perlembagaan (konstitusi) Malaysia NO 2 tahun 1984, Akta A585 tahun 1984.

Wilayah Sabah kemudian menjadi masalah ketika para gerilyawan Kesultanan Sulu datang dan menginjak kaki di Lahad Datu. Yang menjadi persoalan adalah

⁶⁴ Books ; *Nation Unies-Recueil des traites* (1970), "Agreement Relating to Malaysia (1963)", *Malay_text, perkara I-XI.hlm 7-10*, "UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A585 AKTA

ketika Kesultanan Sulu secara sepihak mengklaim bahwa Sabah adalah milik mereka sesuai perjanjinya dengan Sultan Brunei pada tahun 1878, karena ketika itu negeri Sabah masih dalam kekuasaan Kesultanan Brunei, kemudian terjadi kesalahpahaman ketika Inggris datang dan mengambil alih Borneo Utara (Sabah, sekarang), ada perjanjian-perjanjian khusus tentang hak pengelolaan wilayah antara Sultan Sulu dengan perusahaan British North Borneo Company.

Terkait situasi di Sabah yang semakin memanas Pemerintah Malaysia menyikapi secara serius ancaman-ancaman dari pihak luar yang mengganggu kedaulatan mereka di wilayah Sabah. Pada tanggal 12 Februari 2013, sekelompok orang yang menamakan dirinya Sabah Liberal Army (SLA) datang menduduki wilayah Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Orang-orang tersebut merupakan pasukan gerilyawan yang berasal dari Kesultanan Sulu, Filipina. Sultan Sulu, Jamalul Kiram III memerintahkan anak buahnya yang dipimpin langsung oleh Adik Jamalul Kiram III, Agbimudin Kiram untuk menduduki wilayah Sabah dan merebut kembali wilayah yang mereka anggap sebagai tanah kekuasaan Kesultanan Sulu sesuai perjanjian masa lampau yang kemudian dijadikan pedoman oleh Sultan Sulu untuk menginvasi Sabah.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh gerilyawan Sulu. Pemerintah Malaysia awalnya mempunyai tawaran damai yang diajukan kepada Sultan Sulu, agar segera menyerah dan meletakkan senjata, kemudian segera menarik kembali pasukannya yang berada di Sabah. Disamping itu Pemerintah Filipina juga sudah menghubungi Sultan Sulu

untuk melepaskan segala tuntutan di Sabah, dan Presiden Aquino juga memohon kepada Pemerintah Malaysia untuk memberi kelonggaran batas waktu sampai tanggal 27 Februari 2013 untuk para pejuang Sulu agar kembali ke kampung halaman, permohonan tersebut dimaksudkan agar konflik ini tidak semakin meluas. Namun nampaknya tawaran damai yang diajukan Pemerintah Malaysia tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Kesultanan Sulu. Mereka tetap bersikeras akan tetap tinggal di wilayah yang mereka anggap “rumah” mereka sendiri.

Melihat kondisi seperti itu, respon dari pihak Kesultanan sulu juga seakan justru “menantang” Pemerintah Malaysia. Maka kebijakan yang dikeluarkan pun lebih bersifat represif, dalam arti bahwa Pemerintah Malaysia memang tidak ada kompromi lagi terhadap aksi-aksi para pejuang Sulu atau yang lebih dikenal sebagai Sabah Liberal Army (SLA). Pemerintah siap untuk melakukan konfrontasi secara fisik di daerah-daerah krisis, seperti di Lahad Datu, Samporna dan beberapa wilayah yang diduga menjadi jalur masuk para pejuang SLA. Kekuatan Militer Malaysia ditambah Polisi Diraja Malaysia telah membuat Blokade-blokade disetiap wilayah-wilayah di Sabah yang dicurigai sebagai kantong-kantong persembunyian para Gerilyawan Sultan Sulu.

Dalam situasi krisis seperti ini Pemerintah Malaysia tentu segera mengambil sikap atau pun tindakan karena ini menyangkut kedaulatan Malaysia. Proses pembuatan kebijakan (*decission making process*) dalam keadaan krisis

situasi krisis, suatu negara atau pemerintah harus mengambil tindakan secara cepat tepat dan juga mempertimbangkan segala resiko dan konsekuensi. dalam buku karya K.J Holsti tentang interaksi antar negara-negara, ada beberapa model yang bisa penulis gunakan untuk menganalisa sikap atau tindakan suatu negara ketika terjadi konflik karena ada ancaman dari pihak luar.

Sebelum menggunakan tindakan militer biasanya ada kejadian-kejadian yang mendahului sebagai reaksi awal terhadap datangnya ancaman. Seperti yang diungkap dalam buku Holsti, ada beberapa point penting yang cocok diterapkan untuk menganalisa sengketa antara Malaysia dan Kesultanan Sulu. Beberapa point penting tersebut antara lain adalah

Yang *pertama* ialah penyangkalan tuduhan, Sultan Sulu menganggap bahwa Sabah adalah negeri mereka secara sah, Pemerintah Malaysia hanya sebatas menyewa wilayah Sabah untuk dikelola dengan pembayaran setiap tahunnya sejumlah RM 5300. Pemerintah Malaysia segera menyangkal tuduhan tersebut, Pemerintah Malaysia memang membayar sejumlah uang kepada Sultan Sulu, tetapi itu adalah uang penyerahan atau *cession money* atas wilayah Sabah, uang tersebut tidak lebih hanya sebatas kompensasi kepada Sultan Sulu. Menurut konstitusi dan referendum pada tahun 1963, Negeri Sabah secara resmi masuk wilayah Malaysia dan diakui Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kedua, Ancaman “konsekuensi serius” jika tindakan lawan tidak segera di akhiri. Pejuang Sulu tiba di Lahad Datu, Sabah pada tanggal 12 Februari 2013.

Sejak saat itu pula pemerintah Malaysia mulai merespon secara tegas tindakan

tersebut, Perdana Menteri Najib Razak memberi kelonggaran selama beberapa hari dan diperpanjang sampai tanggal 27 Februari atas permintaan Presiden Benigno Aquino, waktu tersebut diberikan kepada para penyusup dari Sulu untuk segera menyerah, meletakkan senjata mereka dan selanjutnya meninggalkan wilayah Sabah.

Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh pihak Kesultanan Sulu dan dipertegas oleh pernyataan Raja Muda Aghbimudin Kiram sebagai pemimpin *Sabah Liberal Army (SLA)*, bahwa pasukan Sulu yang berada di Sabah akan tetap tinggal disana dan tidak akan menyerah sebelum tuntutananya diterima. Mendengar pernyataan tersebut Pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur, segera mengambil tindakan serius menyikapi hal itu, operasi militer segera diterapkan sebagai konsekuensi diacuhkannya tawaran penyerahan yang diberikan kepada pejuang Sulu.

Ketiga, pemberlakuan blokade secara formal. Aktivitas blokade dilakukan sebagai upaya untuk meredam penyebarluasan gerilyawan Sulu. Setelah tawaran untuk menyerah ditolak mentah-mentah oleh pejuang Sulu, maka pada saat itu pula pasukan Sulu mulai masuk jauh lebih dalam ke wilayah Sabah dan memperluas jangkauan invasi. Pemerintah Malaysia menggunakan perangkat militer dengan mengerahkan sejumlah angkatan perang dan Polisi Diraja Malaysia, pihak keamanan Malaysia segera menerapkan blokade di wilayah-

penyusup seperti di Lahad Datu, Kampung Tanduo, Felda, Semporna dan beberapa kawasan di sepanjang pantai timur Sabah.

Penggunaan kekuatan Militer dalam menghadapi situasi krisis oleh suatu negara sangat wajar dilakukan. Ketika jalur negeosiasi sudah tertutup diantara kedua pihak maka konfrontasi militer pun menjadi alternatif yang sangat mungkin terjadi. Perdana Menteri Najib Razak dan Menteri pertahanan Malaysia Ahmad Zahidi Hamid mengeluarkan kebijakan yang bersifat represif. Pemerintah Malaysia segera membuat strategi dan melancarkan operasi militer untuk mengamankan wilayah Sabah dari ancaman para gerilyawan, berbagai macam kebijakan dalam negeri yang menyangkut strategi militer Malaysia yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini antara lain Operasi Daulat (Ops Daulat), ESSZONE dan ESSCOM.

1. Pembentukan Operasi Daulat

Operasi Daulat dibentuk berdasarkan Surat Keterangan tanggal 13 Februari yang dikeluarkan Datuk Sri Omar Ismail, Ketua Polis Negara Malaysia (Kepala Polisi Diraja Malaysia). Surat tersebut kurang lebih berisi tentang berita datangnya segerombolan orang pemberontak asal Sulu yang ingin merebut Negeri Sabah dari Kedaulatan Malaysia.⁶⁵

⁶⁵ Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di Bab 3, tentang Surat Keterangan " KENYATAAN KETUA POLIS NEGARA BERHUBUNG INSIDEN PENCEROBOHAN OLEH KUMPULAN BERSENJATA DI SABAH".

Sejak dibacaknya surat itu lah operasi darurat militer mulai diberlakukan oleh pihak keamanan Malaysia. Operasi daulat merupakan Gabungan dari beberapa kelompok pertahanan Malaysia, yaitu Angkatan Tentara Malaysia (Darat, laut dan udara), Polisi Diraja Malaysia dan pasukan Intelejen. Operasi Daulat berada di bawah komando Menteri Pertahanan Ahmad Zahidi Hamid, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Zulkifeli Mohd. Zain dan Kepala Polisi Diraja Malaysia Datuk Sri Omar Ismail.

Operasi Daulat Militer tersebut dirancang untuk memukul mundur pasukan SLA (Sabah Liberal Army) dari Lahad Datu, dan segera meninggalkan wilayah Sabah beserta segala tuntutanannya. Selain itu misi dari Operasi Daulat adalah membersihkan sisa-sisa penyusup yang masih mendiami beberapa basis pertahanan pejuang gerilyawan Sulu. Kebanyakan dari mereka bersembunyi di wilayah pesisir pantai timur Sabah, seperti di Lahad Datu, Kampung Tanduo, Tanjung Batu, Samporna, felda dan daerah lain di sepanjang garis pantai timur Sabah.

Jumlah pasukan yang diterjunkan dalam Operasi Daulat adalah 3.500 personil militer, yang terdiri dari gabungan beberapa kekuatan keamanan negara Malaysia. Personil militer tersebut dipersenjatai lengkap seperti, pesawat tempur, helicopter, kapal perang, tank baja dan sejumlah senjata api beserta peluru kendali jarak dekat. Masing-masing pasukan disebar dibeberapa kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Malaysia. Yaitu meliputi hampir sebagian besar wilayah dipeninsula negara Sabah seperti Kudat, Kota Kinabalu, dan Tuaran.

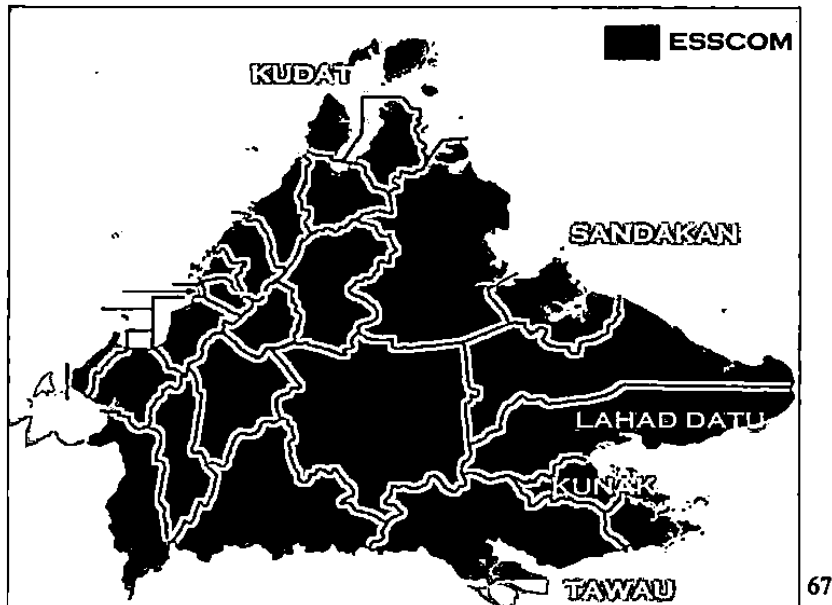
Marudu, Pitas, Sungai Nyamuk, Tanjung Batu, Beluran, Kampung Tanduo, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna, Felda dan Tawau.

Pada pertengahan April 2013 Kepala Angkatan Tentara Malaysia (ATM), Jeneral Tan Sri Zulkifeli Mohd Zain meyakinkan penduduk Malaysia dan masyarakat internasional bahwa Negeri Sabah dan perbatasan pantai timur Sabah telah bebas dari ancaman teroris. Dia juga mengatakan bahwa jumlah tentara di Lahad Datu akan dikurangi secara bertahap dan dipindahkan ke Semporna atau daerah lain seperti Sandakan⁶⁶. Jumlah pasukan yang dikerahkan saat ini hanya sekitar 2.500 personel yang masih ditempatkan, dan sedikit demi sedikit akan dikurangi seiring menurunnya intensitas konflik. Jumlah peralatan tempur, seperti kendaraan lapis baja yang berada di daerah operasi militer juga dikurangi secara bertahap.

Untuk kronologi kegiatan dan operasi militer sudah dibahas secara rinci pada BAB III. Operasi Daulat sendiri di akhiri pada tanggal 15 Maret 2013, akan tetapi tidak hanya sampai disitu ancaman yang ditebar militer Malaysia untuk mengusir penyusup Sultan Sulu. Masih ada pembentukan operasi militer untuk membersihkan dan memulihkan kondisi di Lahad Datu dan beberapa daerah lainnya, yaitu ESSCOM dan ESSZONE.

⁶⁶ Dikutip dari artikel berjudul "*Ops Daulat: Operation To Continue*", sumber <http://malaysiaflingherald.wordpress.com/2013/04/15/ops-daulat-berakhir/>

2. Penerapan Strategi ESSCOM



East Sabah Security Command (ESSCOM), atau Kawasan Keamanan Khusus Pantai Timur Sabah merupakan strategi militer guna mendukung dan melanjutkan operasi daulat yang sudah lebih dulu bergerak untuk menghadapi para penyusup yang masuk melalui pantai timur Sabah. ESSCOM dibentuk oleh Perdana Menteri Najib Razak pada tanggal 7 Maret 2013, dan dipimpin oleh Jenderal Datuk Mohammad Mentek. Tujuannya adalah untuk memperkuat keamanan maritim di perairan timur Sabah setelah krisis invasi dan mencegah kegiatan pemberontakan oleh pejuang Sulu di perairan Sabah, sementara itu pada dasarnya ESSCOM juga bertugas memastikan bahwa kegiatan perdagangan dan bisnis tidak terpengaruh. Pembentukan ESSCOM

⁶⁷ Peta diunduh dari, Eastern Sabah Security Command. (2013, May 15). In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 17:08, July 6, 2013, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eastern_Sabah_Security_Command&oldid=555167667

lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasi militer, seperti pembentukan pos-pos keamanan di beberapa wilayah untuk lebih meningkatkan keamanan di sepanjang perairan timur Sabah⁶⁸.

Selain itu tujuan itu dibentuknya ESSCOM adalah untuk memperkuat kontrol keamanan maritim di bagian timur Sabah sekaligus sebagai kekuatan penyokong bagi operasi militer yang cukup kuat di perbatasan pantai timur Sabah yang membentang dari Kudat di wilayah utara hingga Tawau di wilayah tenggara Sabah⁶⁹, hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas tragedi invasi yang terjadi pada maret 2013 dan mencegah setiap kegiatan yang dicurigai sebagai aksi terorisme yang terjadi di perairan Sabah. Datuk Ismail Sabri Yaacob juga telah menjamin bahwa keberadaan daerah ini tidak akan mengganggu kegiatan perdagangan maupun usaha berskala kecil, sebaliknya itu dapat membantu mencegah kegiatan penyelundupan dan memastikan keamanan pantai timur Sabah selalu terjaga dari invasi pihak luar. Esscom diikuti pembentukan Zona Selamat Timur Sabah (ESSZONE) sebagai landasan hukum bagi ESSCOM. ESSCOM merupakan agen penegakan hukum yang meliputi 10 daerah (Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau).

⁶⁸ Dikutip dari majalah online *New Straits Time*, dengan judul " *ESSCOM upgrades facilities of surveillance posts on east coast of Sabah* ", sumber <http://www.nst.com.my/latest/esscom-upgrades-facilities-of-surveillance-posts-on-east-coast-of-sabah-1.296318>. diakses pada 13 Juli 2013

⁶⁹ Dikutip dari artikel berjudul "*Esscom takes full charge of Sabah's eastern sea border*", sumber <http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/06/30/Esscom-takes-full-charge-of-Sabahs-eastern->

Jenderal Datuk Mohammad Mantek telah mengunjungi beberapa pos keamanan yang dijaga oleh Angkatan Tentara Malaysia dan Anggota pasukan operasi lain yang bermarkas sekitar perairan Tawau, Semporna dan Beluran. Menurut Mohammad Mantek, fokus ESSCOM selama mengunjungi pos-pos keamanan yang dibentuk oleh ESSCOM adalah untuk menentukan kondisi fisik bangunan dan fasilitas dasar di pos, seperti logistik (makanan, obat dll), air, listrik dan berbagai akomodasi penunjang yang lain. Selain itu kunjungan tersebut juga akan meningkatkan moral para anggota pasukan keamanan yang bertugas. Selanjutnya, ESSCOM akan menyiapkan alokasi dana untuk meng-upgrade atau meningkatkan fasilitas di pos-pos keamanan⁷⁰.

Bagaimanapun juga penerapan *East Sabah Security Command* (ESSCOM) telah memberikan angin segar bagi kehidupan Malaysia, khususnya di Kampung Tanduo, Kampung Tanjung Labian di Lahad Datu dan desa-desa lain, termasuk Kampung Lok Buani, Kampung Sungai Merah, Kampung Tanagian, Kampung Tegupi, Kampung Sungai Bilis dan Kampung Tanjung Batu dengan perkiraan populasi warganya yang kurang lebih sebanyak 5.000 jiwa⁷¹.

⁷⁰ *Op. cit.* New Straits Time

⁷¹ Dikutip dari artikel berjudul "ESSCOM breathes new life into Sabah"

<http://www.mysinchew.com/node/89159>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012

3. Penerapan Strategi ESSZONE.



Eastern Sabah Security Zone (ESSZONE), bisa juga diartikan sebagai kawasan atau zona keamanan di timur Sabah. Merupakan pemetaan daerah konflik yang masuk zona merah atau kawasan operasi darurat militer. Daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah meliputi Daerah tersebut adalah Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau⁷³. ESSZONE sendiri dibentuk oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib bin Abdul Razak pada 25 Maret 2013⁷⁴. Sedangkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Aman diangkat menjadi ketua Zona keselamatan Sabah Timur (ESSZONE). Beliau berpendapat bahwa

⁷² Gambar peta diunduh dari, Eastern Sabah Security Zone. (2013, June 17). In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 17:12, July 6, 2013, from

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eastern_Sabah_Security_Zone&oldid=560246446

⁷³ FZL MIRA ROS, *Bernama Media* -- Tue, Apr 2, 2013 <http://my.news.yahoo.com/operasi-daulat-diteruskan-walaupun-pru-diadakan-dalam-masa-050218939.html> diakses pada 5 Juli 2013.

⁷⁴ *Opinion: Military's role in Sabah's security*. <http://www.bernama.com/bernama-tv/berita.asp?id=1111111>

tugasnya tersebut adalah merupakan satu tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya di Sabah⁷⁵. Pembentukan ESSZONE merupakan inisiatif pemerintah Diraja Malaysia dan dipertegas lagi oleh Perdana Menteri untuk memastikan Sabah terus dalam keadaan aman, sejahtera dan rakyat Sabah dapat terus menjalankan semua aktifitas seperti sediakala. Kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Zona merah memang sengaja di sterilkan, penduduk pribumi diungsikan, sekolah dan tempat umum lainnya di liburkan guna mengantisipasi jatuhnya korban dari warga sipil.

Pasukan keamanan Malaysia melalui operasi Dulat telah melakukan operasi di pantai timur Sabah selama beberapa minggu terakhir (terhitung mulai 1 Maret 2013) untuk mengusir sekelompok orang bersenjata dari daerah Kepulauan Sulu Filipina⁷⁶. Misi Esszone adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan bagi masyarakat di Sabah sehingga mereka dapat hidup tanpa rasa takut. Esszone akan menghadapi beberapa tugas. Pertama, menggunakan Rencana Briggs tentang "*Separate Fish from the Water*", yang merupakan strategi yang digunakan selama masa darurat militer di Sabah, oleh karena itu Esszone harus segera menggelar operasi untuk mengidentifikasi imigran legal dan ilegal. Langkah berikutnya adalah mendeportasi imigran ilegal. Polisi Diraja Malaysia dan Angkatan bersenjata harus memperkuat jaringan intelijen mereka untuk

⁷⁵Dikutip dari

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/PelantikanPengerusiESSZONEsatutanggungjawabbesar_Musa/Article

⁷⁶ Dikutip dari <http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/03/25/Lahad-Datu-PM-announces-formation-of-Eastern-Sabah-Safety-Zone.aspx>. Published: Monday, March 25, 2013. Diakses pada 5 Juli 2013.

mendeteksi ancaman yang akan masuk khususnya ke wilayah Sabah. Secara operasional tentu akan lebih banyak sumberdaya dan peralatan yang diperlukan untuk melindungi kawasan timur Sabah, karena Sabah timur memiliki garis pantai yang panjang membentang 1.400 km dari Kudat di bagian utara sampai ke Tawau di bagian selatan⁷⁷.

2. Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Malaysia Terhadap Pemerintah Filipina sebagai upaya meredam klaim Kesultanan Sulu.

Dalam buku K.J. Holsti menyebutkan tentang tindakan yang mungkin dicapai dalam suatu konflik, salah satunya adalah kompromi atau negosiasi, yaitu masalah utama dalam kompromi adalah membuat kedua belah pihak sadar bahwa harga konflik yang berlanjut akan jauh lebih mahal daripada biaya dan konsekuensi pengurangan klaim atau penarikan diri dari suatu posisi diplomatik atau militer.⁷⁸

Pemerintah Malaysia memilih jalur diplomasi kepada Pemerintah Filipina hal tersebut merupakan timbal balik terhadap aksi yang dilakukan Kesultanan Sulu. Pemerintah kedua Negara beberapa kali mengadakan perundingan damai, dengan cara melakukan dialog atau negosiasi guna mencapai hasil yang diharapkan. PM

⁷⁷ Dikutip dari artikel, Datuk Seri Abdul Manap Ibrahim, former deputy army chief (1993-1994), berjudul "ESSZONE: Better security for east Sabah - Letters to the Editor - New Straits Times" <http://www.nst.com.my/opinion/letters-to-the-editor/esszone-better-security-for-east-sabah-1.252890#ixzz2YBUV7cZj>, diakses pada 5 juli 2013.

⁷⁸ Boulding, Kenneth E; *Conflict and Defense* (New York : Harper & Row, 1962. Dikutip dari buku Holsti,

Najib Razak juga menegaskan bahwa “Pemerintah memilih untuk menangani masalah itu melalui negosiasi dan ingin kelompok itu untuk meninggalkan negara dengan aman untuk menghindari pertumpahan darah”⁷⁹.

Pemerintah Filipina seharusnya ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa wilayah ini, karena teritorial Kesultanan Sulu merupakan daerah yang masuk dalam kedaulatan Filipina. Pemerintah kedua negara sepakat melakukan negosiasi untuk menempuh jalan damai yang *win-win solution*. Upaya inilah yang paling mungkin dilakukan agar konflik tidak semakin meluas sehingga tidak menambah korban jiwa yang semakin banyak. Seperti yang gencar dilakukan Presiden Filipina Benigno Aquino yaitu dalam melakukan diplomasi secara agresif seperti yang diungkapkan dalam media massa di Malaysia maupun media massa Filipina.

Pada pertengahan Februari 2013, beberapa hari setelah datangnya para pemberontak Sulu di pesisir Sabah. Sebenarnya Pemerintah Malaysia lewat Perdana Menteri Najib Razak sudah menawarkan untuk jalan damai kepada Kesultanan Sulu, tawaran itu berupa kelonggaran waktu sampai tanggal 27 Februari 2013 agar pejuang Sulu segera meninggalkan Sabah. Kelonggaran tersebut juga merupakan bagian dari keinginan Pemerintah Filipina yang

⁷⁹ ANIS, MAZWAN NIK; “Rundingan Dengan Rakyat Filipina Bersenjata Sedang Dijalankan – PM”, ditulis 14 Februari 2013. Sumber

disetujui oleh Pemerintah Malaysia, sebenarnya waktu yang sebenarnya diberikan kepada pejuang Sulu tidak lebih dari satu minggu.

Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa Pemerintah Malaysia hanya berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya memberantas gerombolan Sulu yang sejak bulan Februari-Maret menduduki wilayah Lahad Datu di Sabah. Pemerintah Malaysia sendiri menganggap kasus ini hanyalah sebatas *Domestic issue*. Dalam artian bahwa, kasus ini biarlah intern Malaysia saja yang menyelesaikan sesuai dengan cara mereka sendiri. Pada akhir bulan Maret tawaran untuk negosiasi justru datang dari Presiden Filipina Benigno Aquino. Aquino secara terang-terangan mengungkapkan kepada media massa bahwa ia mempunyai harapan besar untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Malaysia.

Disisi lain Pemerintah Malaysia juga mengantisipasi kemungkinan Internasionalisasi konflik oleh pihak Kesultanan Sulu. Karena pihak Sulu mulai gencar menggalang simpati dan dukungan dari berbagai negara untuk mendukung klaim mereka di Sabah, dan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Akan tetapi menurut Prof. Dr. Ranjit Singh (University of Utara), menyatakan bahwa Malaysia tidak perlu membawa isu Sabah ini ke ICI atau Mahkamah Internasional, secara historis dan

non-historis, faktanya sudah jelas bahwa Sabah masuk dalam Kedaulatan Malaysia.⁸⁰

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mempertimbangkan untuk mengekstradisi Sultan Sulu Jamalul Kiram III yang masih berada di Filipina, karena Sultan Jamalul Kiram III adalah orang yang dianggap bertanggung jawab atas penyusupan ratusan pengikutnya ke wilayah Sabah, Malaysia. Walaupun Malaysia dan Filipina belum menandatangani perjanjian ekstradisi tapi Anifah Aman Yakin dan optimis hal tersebut bisa dilakukan dengan koordinasi kedua belah pihak.⁸¹ Akan tetapi menurut beberapa sumber berita, Pemerintah Filipina enggan untuk melakukan proses hukum ekstradisi, karena belum terjalannya perjanjian ekstradisi antara Malaysia dan Filipina.

Tindakan atau respon dari Pemerintah Filipina menyikapi tuntutan dari Pemerintah Malaysia adalah melakukan *humanitarian mission* sebagai respon atas tuntutan pihak Malaysia yang menuntut agar para pejuang Sulu segera dievakuasi kembali ke Sulu dengan batasan waktu yang sangat singkat sekitar 48 jam sebelum tenggang waktu tanggal 27 Februari 2013 berakhir. Misi tersebut sebagai bentuk perhatian atau kepedulian yang mendalam dari Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario yang menyatakan akan mengirim pesawat

⁸⁰ Dikutip dari majalah NEW STRAITS TIME; "Expert: No need to bring issue of Sabah rights to ICJ".
<http://www.nst.com.my/latest/expert-no-need-to-bring-issue-of-sabah-rights-to-icj-1.240062>. diakses pada tanggal 26 Juli 2013.

⁸¹ Dikutip dari artikel, "Malaysia Ingin Ekstradisi", Jumat, 8 Maret 2013 | 02:46 WIB
<http://internasional.kompas.com/read/2013/03/08/02463091/Malaysia.Ingin.Ekstradisi> diakses

tempur untuk petrol keamanan di Laut Sulu dan mengirim 6 kapal perang,⁸² atau dalam istilah aslinya yaitu "*humanitarian ship*" untuk mengangkut kembali para pejuang Sulu yang masih tersisa di wilayah Sabah, serta beberapa keluarga dari para pejuang yang ikut serta menduduki wilayah Sabah. Selain itu Pemerintah Filipina meminta agar diberi kelonggaran waktu untuk berdialog dengan Sultan Sulu. Waktu tersebut digunakan untuk membujuk Sultan Sulu agar memerintahkan anak buahnya yang masih berada di Sabah agar mau menyerah dan ikut kembali ke Sulu menggunakan *humanitarian ship* yang sudah disediakan Pemerintah Filipina.⁸³

Selain itu Pemerintah Filipina juga mencari dukungan dari PBB dan ASEAN untuk andil dalam penyelesaian konflik di Sabah. Pemerintah Filipina berharap PBB dan ASEAN bisa memastikan bahwa semua kebijakan Negara bisa ditegakkan di Sabah sesuai dengan standar HAM internasional. Selanjutnya organisasi-organisasi internasional yang lain diharapkan dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada individu yang terkena musibah dan keluarga baik

⁸² "*PH navy ships near Sabah as deadline for 'Sulu army' to leave looms*", sumber <http://globalnation.inquirer.net/65185/ph-naval-ships-in-tawi-tawi-waters-to-help-stabilize-situation#ixzz2a2QXMTun>

⁸³ Placido, Dharel; "*Sulu 'royal army' won't board 'humanitarian' ship*". Sumber <http://www.abs->

yang di wilayah Sabah maupun pulau-pulau selatan Filipina, khususnya Kepulauan Sulu sendiri.⁸⁴

Dalam proses perundingan atau negosiasi antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Filipina terkait resolusi konflik di Sabah mungkin kedua pihak melakukan *silent diplomacy*. Negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Asian Peace and Reconciliation Council (APRC), menerapkan "*Silent Diplomacy*" yang merupakan pokok atau inti dari lembaga tersebut. APRC tidak akan mempublikasikan upaya mediasi yang sedang berjalan dan akan mengumumkan keterlibatan mereka hanya sekali setelah resolusi tersebut tercapai.⁸⁵

Dalam kasus di Sabah ini, proses perundingan atau mediasi yang dilakukan oleh para petinggi Pemerintahan di Malaysia dan Filipina mungkin menerapkan *silent diplomacy* dalam upaya resolusi konflik di Sabah. Pihak yang berunding mungkin saja sengaja untuk tidak mempublikasikan proses negosiasi kepada media massa jadi hanya intern pembuat kebijakan yang tahu bagaimana proses perdamaian di Sabah. Jadi tidak semua informasi penting bisa di dapat di media massa, beberapa kebijakan yang bersifat rahasia mungkin saja tidak akan di beritakan kepada masyarakat luas.

⁸⁴ Palatino, Mong ; "*Filipinos Look to the UN, ASEAN for Help in Sabah*". March 14, 2013; sumber <http://thediomat.com/asean-beat/2013/03/14/filipinos-look-to-the-un-asean-for-help-in-sabah/>. Diakses pada 30 Juli 2013

⁸⁵ Hamer, Alexander ; The Jakarta Post, '*Silent diplomacy*' needed in Asian conflict resolution; January 25